

DETERMINAN DAYA TARIK INVESTASI KOTA TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT

Ika Sartika*

*Korespondensi: ika_sartika@ipdn.ac.id

ABSTRACT

One of the objectives of regional autonomy is to increase regional competitiveness, which automatically increases the welfare of the people. According to the results of previous studies, regional competitiveness will increase if investment attractiveness is high. This means that many investors are interested in investing in the area. The city of Tasikmalaya which was founded in 2001 has a relatively low level of competitiveness compared to other younger areas, such as West Bandung Regency and Banjar City. According to a study by the Monitoring Committee for the Implementation of Regional Autonomy (KPPOD), the City of Tasikmalaya is not included in the ranking of the best cities in terms of investment attractiveness. This study aims to analyze the determinants of investment attractiveness to increase the competitiveness of the City of Tasikmalaya. This research was conducted with a quantitative and qualitative descriptive approach in accordance with the research objectives. Qualitative data were obtained through interviews with 17 informants who came from elements of the government and entrepreneurs from various sectors. The results of the interviews combined with the results of observations and secondary data are used to describe the investment attractiveness of the City of Tasikmalaya. Quantitative data analysis used a modified Analytical Hierarchy Process (AHP) model. The results obtained are the attractiveness of investment in the City of Tasikmalaya, especially in the tertiary sector with the dominant category of information and communication services. Meanwhile, the determinants of investment attractiveness in the City of Tasikmalaya based on the perceptions of entrepreneurs according to rank are regional economic aspects, institutions, physical infrastructure, socio-politics, as well as labor and productivity.

Kata kunci: determinant of investment attractiveness; regional economy; information and communication services; tertiary sector

ABSTRAK

Salah satu tujuan otonomi daerah adalah meningkatnya daya saing daerah, yang secara otomatis kesejahteraan masyarakat juga meningkat. Menurut hasil kajian sebelumnya, daya saing daerah akan meningkat jika daya tarik investasi tinggi. Artinya banyak investor yang tertarik untuk menanamkan modalnya di daerah tersebut. Kota Tasikmalaya yang berdiri sejak tahun 2001 memiliki tingkat daya saing yang relatif rendah dibanding daerah lain yang lebih muda, seperti Kabupaten Bandung Barat dan Kota Banjar. Menurut kajian Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Kota Tasikmalaya tidak termasuk dalam peringkat kota terbaik dari sisi daya tarik investasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan daya tarik investasi untuk meningkatkan daya saing Kota Tasikmalaya. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kuantitatif dan kualitatif sesuai dengan tujuan penelitian. Data kualitatif diperoleh melalui wawancara dengan informan yang berjumlah 17 orang yang berasal dari unsur pemerintah serta pengusaha dari berbagai sektor. Hasil wawancara digabung dengan hasil observasi dan data sekunder digunakan untuk mendeskripsikan daya tarik investasi Kota Tasikmalaya. Analisis data kuantitatif menggunakan modifikasi model *Analytical Hierarchy Process (AHP)*. Hasil yang diperoleh adalah daya tarik investasi di Kota Tasikmalaya terutama di sektor tersier dengan kategori jasa informasi dan komunikasi yang dominan. Sedangkan determinan daya tarik investasi di Kota Tasikmalaya berdasarkan persepsi para pengusaha sesuai peringkat adalah aspek ekonomi daerah, kelembagaan, infrastruktur fisik, sosial politik, serta tenaga kerja dan produktivitas.

Keywords: determinan daya tarik investasi; ekonomi daerah; jasa informasi dan komunikasi; sektor tersier

PENDAHULUAN

Otonomi daerah sebagai wujud pelaksanaan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan pada hakekatnya merupakan penetapan konsep teori *areal division of power* yang membagi kekuasaan negara secara vertikal. Dalam konteks ini, kekuasaan terbagi antara pemerintah pusat di satu pihak dan pemerintah daerah di lain pihak, yang secara legal konstitusional tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Melalui pemerintahan yang desentralistik, akan terbuka wadah demokrasi bagi masyarakat lokal untuk berperan dalam menentukan nasibnya, serta berorientasi kepada kepentingan rakyat melalui pemerintahan daerah yang terpercaya, terbuka dan jujur serta bersikap tidak mengelak terhadap tanggung jawab sebagai prasyarat terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan mampu memenuhi asas-asas kepatuhan dalam pemerintahan.

Tujuan utama dikeluarkannya kebijakan desentralisasi yaitu membebaskan pemerintah pusat dari berbagai beban dan menangani urusan suatu daerah yang bisa diserahkan kepada pemerintah daerah. Oleh karenanya pemerintah pusat memiliki kesempatan untuk mempelajari, merespon, memahami berbagai kecenderungan global dan menyeluruh serta dapat mengambil manfaat daripadanya. Pemerintah pusat diharap lebih mampu berkonsentrasi dalam perumusan kebijakan makro atau luas yang sifatnya umum dan lebih mendasar. Sedangkan pemerintah daerah dapat melaksanakan proses pemberdayaan yang lebih optimal. Dengan demikian kemampuan, prakarsa dan kreativitas pemerintah daerah akan terpacu, sehingga pemerintah daerah dapat mengatasi masalah yang terjadi di daerahnya secara optimal. Tujuan lainnya dari kebijakan otonomi daerah antara lain: mengembangkan kehidupan demokrasi, pemerataan, keadilan, mendorong dalam memberdayakan masyarakatnya, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD juga memelihara hubungan baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Pelaksanaan desentralisasi merupakan titik fokus yang penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan yaitu pemerintah daerah. Pemerintah daerah bebas berkreasi dan berekspresi dalam rangka membangun daerahnya, tentu saja dengan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan.

Studi yang telah dilakukan beberapa pihak terkait pencapaian tujuan otonomi daerah masih memprihatinkan. Salah satu kajian yang telah dilakukan oleh KPPOD (Komite Pemantau

Pelaksanaan Otonomi Daerah) menyebutkan bahwa masih banyak daerah yang belum meningkat daya saingnya yang disebabkan oleh beberapa faktor penghambat. Padahal salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah ialah peningkatan daya saing daerah. Persaingan yang semakin tajam menuntut pemerintah daerah menyiapkan daerahnya sedemikian rupa sehingga mampu menarik investasi, orang dan industri ke daerah. Keberhasilan daerah untuk meningkatkan daya tariknya terhadap investasi tergantung dari kemampuan daerah dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan investasi. Selain itu kemampuan daerah untuk menentukan faktor-faktor yang dapat digunakan sebagai alat ukur daya saing perekonomian daerah relatif terhadap daerah lainnya juga penting terkait dengan pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur fisik dalam upaya meningkatkan daya tariknya dan memenangkan persaingan (KPPOD, 2003).

Kota Tasikmalaya yang berada di sebelah Timur Provinsi Jawa Barat saat ini tengah gencar-gencarnya mengadakan berbagai macam festival berskala nasional maupun internasional seperti *Tasik Festival (TAFEST)*, *Tasik Open 2010* dalam bidang olahraga tingkat nasional, *Festival Kuliner Tasikmalaya*, *Tasikmalaya Craft and Culture Festival*, dan festival-festival lainnya yang rutin diadakan tiap tahun di kota ini. Hal ini membuat perekonomian di Kota Tasikmalaya benar-benar menggeliat dan maju, karena banyaknya antusiasme para pengunjung dari seluruh Indonesia yang hendak menyaksikan langsung kemeriahan festival-festival tersebut. Tentunya festival-festival tersebut memperkenalkan Tasikmalaya di mata Indonesia dan mancanegara serta mengangkat perekonomian warga Tasikmalaya itu sendiri tentunya. Oleh karena itu juga, kini nama Tasikmalaya dikenal sebagai kota modern yang menjunjung tinggi kearifan budaya lokal, budaya Sunda khas Tasikmalaya. Semua upaya ini tentu diharapkan dapat lebih menarik investor ke kota tersebut dan pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing daerah Kota Tasikmalaya.

Kota Tasikmalaya sebagai daerah otonom merupakan pemekaran dari Kabupaten Tasikmalaya yang disahkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 yang terdiri atas 8 (delapan) kecamatan dengan jumlah kelurahan sebanyak 15 dan desa sebanyak 54. Tetapi dalam perjalanannya melalui Perda No. 30 Tahun 2003 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, desa-desa di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya berubah statusnya menjadi kelurahan, sehingga jumlah kelurahan menjadi sebanyak 69 kelurahan, sedangkan untuk kecamatan bertambah menjadi 10 kecamatan, yaitu: Bungursari, Cibeureum, Cihideung, Cipedes, Indihiang, Kawalu, Mangkubumi, Purbaratu, Tamansari, serta Tawang. Banyak potensi yang tersebar di setiap kecamatan di Kota Tasikmalaya. Hampir 70%, pusat bisnis, pusat perdagangan dan jasa, dan pusat industri di Priangan Timur dan Selatan berada di kota ini. Priangan Timur dan Selatan yakni membentang dari Kota Banjar di ujung Timur Jawa Barat, Kabupaten Ciamis, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Cianjur, Kabupaten dan Kota Sukabumi di ujung Barat Jawa Barat. Wilayah Priangan Timur dan Selatan ini mencapai 40% total keseluruhan wilayah Jawa Barat, itu artinya sepertiga lebih dari pusat perekonomian yang ada di Jawa Barat berada di kota ini. Oleh karena itu, sangat cocok bagi para investor baik itu bidang perhotelan, sarana dan prasarana, pusat perbelanjaan untuk menanamkan

modalnya di kota priangan timur ini. Kota Tasikmalaya membuka peluang yang sebesar-besarnya bagi para investor untuk berinvestasi di kota ini. Kota Tasikmalaya sendiri berpenduduk sekitar 700 ribuan, sehingga sangat potensial untuk dijadikan pangsa pasar investasi.

Perkembangan ekonomi serta potensi yang dimiliki oleh Kota Tasikmalaya sudah tidak diragukan lagi dan merupakan modal dasar yang sangat kuat untuk investor lokal mau pun asing. Namun hal ini perlu dibarengi dengan usaha yang keras dari pemerintah kota, mengingat persaingan kota semakin ketat. Data yang diperoleh dari Kementerian Dalam Negeri (2011) mengenai daya saing daerah untuk 8 (delapan) daerah otonom baru di Provinsi Jawa Barat, memperlihatkan bahwa daya saing Kota Tasikmalaya masih kalah dengan Kota Banjar, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1 Perbandingan Daya Saing Daerah Otonom Baru Berdasarkan Usia dan Level Pemerintahan

Daerah Otonom	UU Pembentukan	Usia Daerah	Daya Saing Daerah
Kabupaten Bandung Barat	UU No. 12 Tahun 2007	4 tahun	8,63
Kota Cimahi	UU No. 9 Tahun 2001	10 tahun	7,79
Kota Depok	UU No. 15 Tahun 1999	12 tahun	6,58
Kota Tasikmalaya	UU No. 10 Tahun 2001	10 tahun	5,46
Kota Banjar	UU No. 27 Tahun 2002	9 tahun	7,51
Kota Cilegon	UU No. 15 Tahun 1999	12 tahun	5,14
Kota Serang	UU No. 32 Tahun 2007	4 tahun	5,00
Kota Tangerang Selatan	UU No. 51 Tahun 2008	3 tahun	4,00

Sumber: Kementerian Dalam Negeri (2011)

Penelitian tentang daya tarik investasi yang sudah dilakukan sebelumnya di antaranya adalah: peneringkatan daya tarik investasi dengan menggunakan indikator (1) Kelembagaan; (2) Sosial Politik; (3) Perekonomian Daerah; (4) Tenaga Kerja; dan (5) Produktivitas (KPPOD (2003); Kuncoro dan Rahajeng (2005)). Penelitian lainnya lebih fokus pada investasi daerah dan daya saing daerah (Sodik dan Nuryadin (2008); Indrawati (2012)). Tulisan ini mencoba untuk mendeskripsikan daya tarik investasi secara lebih rinci dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Harapannya, hasil penelitian akan lebih menggambarkan kondisi real Kota Tasikmalaya beserta potensinya yang dapat menarik investor untuk melakukan investasi. Berdasarkan determinan daya tarik investasi di Kota Tasikmalaya, selanjutnya dapat dirumuskan rencana tindak untuk meningkatkan daya saing Kota Tasikmalaya. Dalam jangka panjang, daya

saing Kota Tasikmalaya akan semakin meningkat dan bisa sejajar atau bahkan melebihi kota-kota lainnya yang ada di Indonesia.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kuantitatif dan kualitatif sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan menggunakan kombinasi metode analisis yang berbeda, maka akan diperoleh deskripsi penelitian yang lebih lengkap dan rinci. Lingkup operasional penelitian ini difokuskan pada lima hal untuk melihat daya tarik investasi yang dapat dijadikan dasar untuk peningkatan daya saing Kota Tasikmalaya, yaitu:

Tabel 2 Lingkup Operasional Penelitian

Konsep	Dimensi	Indikator
Determinan Daya Tarik Investasi	Kelembagaan	a. Kepastian hukum b. Keuangan daerah c. Aparatur d. Peraturan daerah
	Sosial Politik	a. Sosial politik b. Keamanan c. Budaya
	Ekonomi Daerah	a. Potensi ekonomi b. Struktur ekonomi
	Tenaga Kerja dan Produktivitas	a. Biaya tenaga kerja b. Ketersediaan tenaga kerja c. Produktivitas tenaga kerja
	Infrastruktur Fisik	a. Ketersediaan infrastruktur fisik b. Kualitas infrastruktur fisik

Sumber: KPPOD (2003)

Berdasarkan pada data yang diperlukan, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara yang dilakukan terhadap informan untuk memperoleh gambaran tentang daya tarik investasi di Kota Tasikmalaya. Informan yang berhasil terjaring dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3 Jenis Informan

No.	Informan	Jumlah (Orang)
1.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3
2.	Badan Penanamam Modal dan Pelayanan Izin Terpadu	2
3.	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan	2
4.	Pengusaha (Bordir, Properti, Kuliner, Mendong, Batik, Alas Kaki)	10

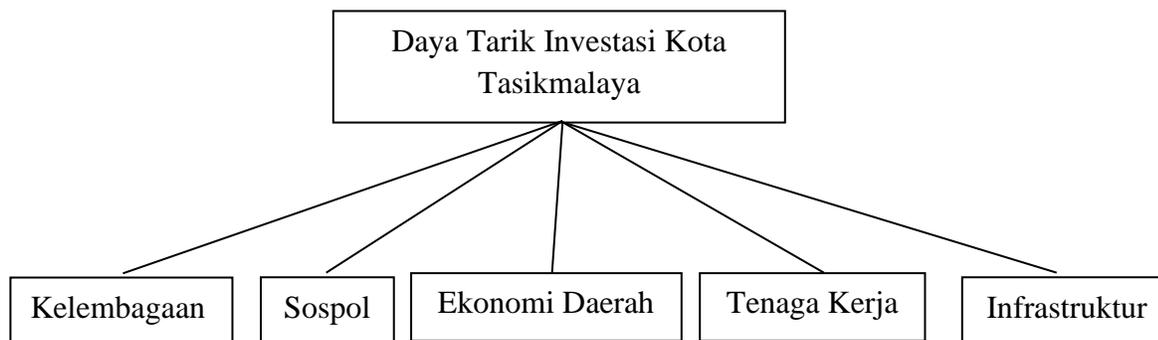
- b. Dokumentasi; dilakukan terhadap dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian seperti: hasil-hasil penelitian sebelumnya tentang daya tarik investasi dan daya saing daerah, data historis, gambar, peta, peraturan, serta tulisan-tulisan dalam media yang relevan dan terkait dengan topik penelitian.
- c. Observasi; peneliti melibatkan diri dengan kegiatan yang sedang diamati, seperti dalam kegiatan-kegiatan investasi di Kota Tasikmalaya. Dengan observasi seperti ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sesuai dengan kenyataan. Di samping itu untuk melihat potensi lain yang mendukung daya tarik investasi dan daya saing daerah di Kota Tasikmalaya diperlukan observasi yang cukup teliti. Hasil observasi selanjutnya akan ditulis dalam form yang sudah disediakan.

Data kuantitatif dianalisis dengan menggunakan modifikasi dari prinsip *AHP (Analytical Hierarchy Process)*. Proses hirarki analitik (*Analytical Hierarchy Process/AHP*) dikembangkan pertama kali oleh Thomas L. Saaty dari Universitas Pittsburg Amerika Serikat pada awal tahun 1970-an. Saaty (1993) mengatakan proses hirarki adalah merupakan metode atau alat yang dapat digunakan oleh seorang pengambil keputusan untuk memahami kondisi suatu sistem, membantu melakukan prediksi dan pengambilan keputusan.

Model AHP diawali dengan proses penyusunan hirarki (*decomposition*), yaitu menggambarkan dan menguraikan secara hirarki dengan cara memecah-mecah persoalan menjadi unsur yang terpisah-pisah. Proses penyusunan hirarki secara praktis dapat dijelaskan sebagai berikut. *Pertama* adalah mengidentifikasi tujuan keseluruhan pembuatan hirarki atau lazim disebut *goal*. *Goal* di sini adalah masalah yang akan dicari pemecahannya lewat model *AHP*. *Kedua* Setelah penentuan tujuan maka dilakukan penentuan kriteria yang diperlukan atau yang sesuai dengan tujuan keseluruhan itu. Kriteria biasanya terdiri dari syarat-syarat atau keadaan yang kiranya dapat menunjang tercapainya sebuah *goal* dan bisa masih bersifat umum atau sudah bersifat khusus. Apabila kriteria yang ditentukan sudah bersifat khusus maka tidak dibutuhkan sub kriteria lagi. *Yang ketiga atau terakhir* adalah mengidentifikasi alternatif-alternatif yang akan dievaluasi di bawah kriteria.

Model AHP yang digunakan dalam penelitian ini merupakan modifikasi dari model yang telah dikembangkan oleh Saaty (1993). Struktur model dalam penelitian ini hanya terdiri atas 2 (dua) level seperti terlihat pada Gambar 1.

- Tujuan (*Goal*) adalah daya tarik investasi di Kota Tasikmalaya.
- Kriteria dijabarkan dari hasil kajian KPPOD, yaitu: kelembagaan, sosial politik ekonomi daerah, tenaga kerja dan produktivitas, serta infrastruktur fisik.



Gambar 1 Model Hirarki Daya Tarik Investasi di Kota Tasikmalaya

Langkah selanjutnya adalah penilaian kriteria yang dinilai melalui teknik perbandingan berpasangan (*pairwise comparasion*) terhadap elemen-elemen pada suatu tingkatan hirarki. Penilaian dilakukan dengan memberikan bobot numerik dan membandingkan elemen satu dengan elemen yang lain. Menurut Saaty dalam Marimin (2004:79) skala 1 sampai 9 adalah skala terbaik dalam mengekspresikan pendapat. Nilai dan definisi pendapat kualitatif dari skala perbandingan Saaty dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4 Skala Banding Secara Berpasangan

Skala	Pengertian	Keterangan
1	Kedua elemen Sama pentingnya (<i>equal importance</i>)	Kriteria/Alternatif A sama penting dengan kriteria/alternatif B
3	Elemen yang satu sedikit lebih penting (<i>moderate importance</i>)	A sedikit lebih penting dari B
5	Lebih penting (<i>essential/strong importance</i>)	A jelas lebih penting dari B
7	Sangat lebih penting (<i>very strong importance</i>)	A sangat jeas lebih penting dari B
9	Mutlak sangat penting (<i>extreme importance</i>)	A mutlak lebih penting dari B
2,4,6,8	Merupakan angka kompromi diantara penilaian diatas	Apabila ragu-ragu diantara dua nilai yang berdekatan

Sumber: Saaty (1993)

Setelah diperoleh matriks perbandingan berpasangan yang diperoleh dari persepsi *expert* (informan) tersebut, kemudian dilakukan perhitungan vektor eigen (*eigen vector*) dan nilai eigen (*eigen value*) serta perhitungan konsistensi yang akan menentukan prioritas pilihan. *Eigenvector* adalah suatu vektor yang apabila dikalikan dengan sebuah matriks hasilnya adalah vektor itu sendiri dikalikan sebuah bilangan skalar atau parameter, dimana bilangan itu adalah *eigenvalue*. Jika

eigenvector tersebut kita beri simbol W , *eigenvalue* simbol λ . dan matrik bujursangkar A , maka bentuk persamaannya adalah sebagai berikut:

$$A \cdot W = \lambda \cdot W$$

Keterangan: A = Matriks perbandingan (*Matrix Pairwise*).

λ = Nilai Eigen (*Eigenvalue*).

W = Vektor Eigen (*Eigenvector*).

Dari *eigenvector* yang diperoleh ditentukan *local priority*, yaitu prioritas untuk satu level. Prioritas keseluruhan diperoleh dengan mengalikan prioritas elemen pada level di atasnya sampai ke level akhir. Nilai eigen maksimum yang menentukan prioritas lokal maupun keseluruhan.

Langkah selanjutnya adalah semua elemen dikelompokkan secara logis dan diperingkatkan secara konsisten sesuai dengan suatu kriteria yang logis. Konsistensi berarti dua hal, pertama menunjukkan pemikiran atau objek yang serupa dikelompokkan menurut homogenitas dan relevansinya. Yang kedua adalah intensitas relasi antar gagasan atau antar obyek yang dirasakan pada satu kriteria tertentu saling membenarkan secara logis. Pengukuran konsistensi dalam model *AHP* dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama adalah mengukur konsistensi setiap matriks perbandingan dan tahap kedua adalah mengukur konsistensi keseluruhan hirarki. Setiap perbandingan dinyatakan *konsisten 100 %* apabila memenuhi:

$$a_{ij} \cdot a_{jk} = a_{ik}$$

Setiap angka dalam matriks perbandingan pada dasarnya adalah sebuah rasio karena angka yang timbul didasarkan atas perbandingan antara dua elemen. Apabila tertulis angka atau skala 7 dalam sebuah matriks perbandingan, maka itu tidak lain adalah 7/1. Konsistensi dalam sebuah matriks perbandingan diukur melalui rumus $A \cdot W = \lambda \max \cdot W$

Indeks Konsistensi (CI) diperoleh dari: $CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n - 1}$

Untuk mengetahui apakah CI dengan besaran tertentu cukup baik atau tidak, perlu diketahui rasio yang dianggap baik, yaitu apabila $CR \leq 0,1$.

Rumus CR adalah: $CR = CI/RI$; dimana: $RI = \text{Random Index}$

Nilai RI merupakan nilai random indeks yang dikeluarkan oleh *Oarkridge Laboratory* yang berupa tabel berikut ini:

Tabel 5 Nilai RI

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RI	0,00	0,00	0,58	0,90	1,12	1,24	1,32	1,41	1,45	1,49	1,51	1,56

Sumber: Marimin (2004)

Teknik analisis berikutnya adalah untuk data kualitatif yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi. Untuk data kualitatif dianalisis setelah ditabulasi dan dibuat kategorisasi sesuai

kepentingan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Daya Tarik Investasi di Kota Tasikmalaya

Sesuai dengan konsep yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, daya tarik investasi di Kota Tasikmalaya akan dirinci berdasarkan indikator-indikator yang sudah dikembangkan dalam kajian KPPOD. Supaya lebih mendalam, pembahasan dilengkapi dengan hasil wawancara dengan informan, hasil observasi, serta data sekunder yang relevan dengan pembahasan.

(1) Kelembagaan

Indikator pertama yang terkait dengan daya tarik investasi adalah kelembagaan. Secara lengkap, indikator kelembagaan dirinci menjadi 4 (empat) sub indikator, yaitu: kepastian hukum, keuangan daerah, aparatur, serta peraturan daerah. Secara kelembagaan, Kota Tasikmalaya sudah memiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan ijin untuk investasi. Hal ini tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pengusaha di Kota Tasikmalaya, diperoleh informasi bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan. Artinya, pengusaha yang tidak memenuhi syarat tidak diberi ijin melakukan investasi di Kota Tasikmalaya. Bahkan cenderung sangat ketat dan selektif dalam mengeluarkan surat ijin usaha, terutama untuk investor besar.

Kepastian hukum dapat dilihat dari dua aspek, yaitu: ketersediaan peraturan yang mengayomi investasi di Kota Tasikmalaya serta ketaatan terhadap peraturan tersebut. Terdapat 9 (sembilan) peraturan yang tersedia dalam bidang investasi di Kota Tasikmalaya. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan para pengusaha di Kota Tasikmalaya, diperoleh informasi bahwa pada dasarnya permohonan izin usaha di Kota Tasikmalaya sudah relatif mudah. Sudah ada payung hukum yang jelas dan dilaksanakan secara konsisten oleh Walikota Tasikmalaya beserta jajarannya.

Profil keuangan Kota Tasikmalaya ditunjukkan oleh dua hal, yaitu penerimaan dan alokasi keuangan. Dari sisi penerimaan, Kota Tasikmalaya memperoleh dana perimbangan yang paling besar, yaitu sebesar: 53% dibanding pendapatan asli daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sedangkan pendapatan asli daerah menempati posisi paling kecil persentasenya, yaitu sekitar 16%, seperti diperlihatkan pada gambar di bawah ini. Fakta ini berbicara bahwa Kota Tasikmalaya harus mampu menggali potensi lokalnya, sehingga pendapatan asli daerah dapat meningkat. Dengan demikian kemandirian lokal dapat terwujud dan daya saing kota menjadi tinggi. Hal ini sesuai dengan visi Kota Tasikmalaya yang tertuang dalam RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017.

Sementara itu profil PNS di Kota Tasikmalaya digambarkan sebagai berikut. Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya pada tahun 2015 sebanyak 8.764 orang, yang terdiri atas Golongan I sebanyak 105 orang, Golongan II sebanyak 1.666 orang, Golongan III sebanyak 3.321 orang, dan Golongan IV sebanyak 3.672 orang. Berdasarkan golongan, komposisi PNS di Kota Tasikmalaya sudah cukup baik, artinya memadai

untuk bisa mengembangkan Kota Tasikmalaya menjadi kota yang mandiri dan mempunyai daya saing tinggi. Kualitas PNS dapat dilihat berdasarkan pendidikan juga. Berikut adalah komposisi PNS Kota Tasikmalaya berdasarkan pendidikan. Berdasarkan tingkat pendidikan, jumlah pegawai negeri sipil yang berpendidikan S2/S3 sebanyak 544 orang, S1 sebanyak 4.581 orang, D4 sebanyak 89 orang, D3 sebanyak 838 orang, D2 sebanyak 700 orang, D1 sebanyak 82 orang, SLTA sebanyak 1.744 orang, SLTP 127 orang, dan SD sebanyak 71 orang.

Berdasarkan pendidikan, PNS Kota Tasikmalaya didominasi oleh S1 (52%). Data ini menunjukkan kondisi yang cukup baik, artinya sudah banyak PNS yang berada pada level analisis atau perencanaan. Dari sisi golongan dan pendidikan, kondisi PNS di Kota Tasikmalaya sudah cukup memadai. Yang terpenting adalah pelayanan yang diberikan oleh para PNS ini, apakah sudah dapat memuaskan masyarakat? Terutama masyarakat yang mengajukan permohonan izin usaha. Berdasarkan wawancara dengan informan yang berasal dari para pengusaha, diperoleh informasi bahwa pelayanan yang diberikan masih harus ditingkatkan lagi. Artinya, masih ada beberapa pihak yang terkesan enggan untuk melayani masyarakat. Tentu saja hal ini dapat menghambat perkembangan Kota Tasikmalaya di masa yang akan datang.

(2) Sosial Politik

Aspek sosial politik dapat dibedakan berdasarkan 3 (tiga) kategori, yaitu: sosial politik, keamanan, dan budaya. Dari aspek sosial politik, iklim usaha di Kota Tasikmalaya sudah cukup kondusif. Tidak pernah ada demo buruh atau kerusuhan sosial yang mengganggu jalannya usaha. Bahkan peraturan pun sangat mendukung dengan berbagai kemudahan dalam pengajuan izin usaha.

Bidang usaha yang cocok dikembangkan di Kota Tasikmalaya adalah yang sesuai dengan budaya di kota tersebut. Seperti kita ketahui bersama, bahwa Tasikmalaya adalah kota santri, sehingga jenis usaha yang sesuai dengan budaya religious lah yang paling sesuai untuk dikembangkan di Kota Tasikmalaya. Hal ini sejalan dengan amanat dalam RPJMD, bahwa jenis usaha yang sesuai untuk dikembangkan adalah investasi skala kecil, bukan industri berat, non polutan, dan yang paling penting adalah jenis usaha yang memanfaatkan potensi lokal. Hal senada dikemukakan oleh informan yang berasal dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah serta Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Tasikmalaya.

Secara umum pembangunan di Kota Tasikmalaya telah berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat. Di bidang kependudukan, penduduk di Kota Tasikmalaya bertambah dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk yang relatif kecil sebesar 0,62 persen per tahun. Kecamatan Purbaratu mempunyai laju pertumbuhan penduduk terendah (0,52%), sedangkan yang tertinggi terjadi di Kecamatan Tamansari (0,72%). Setelah diobservasi dan hasil wawancara dengan para informan, diperoleh data bahwa di Kecamatan Tamansari terdapat perguruan tinggi, yaitu Universitas Siliwangi. Inilah yang menjadi pemicu pertumbuhan penduduk di Kecamatan Tamansari relatif lebih tinggi dibanding dengan kecamatan lainnya. Perguruan tinggi sebagai pemicu pertumbuhan penduduk, karena para pendatang yang kemudian bermukim di situ, baik sebagai mahasiswa atau sekedar mengadu nasib sebagai pegawai di sektor formal dan informal,

serta para pengusaha yang sengaja berinvestasi di sektor pendidikan dan pendukungnya. Laju pertumbuhan penduduk perempuan (0,72%) lebih tinggi daripada penduduk laki-laki (0,53%) sehingga *sex rasionya* mendekati berimbang menjadi 101,27.

Selanjutnya data di bidang pendidikan menunjukkan bahwa sekitar 27,80 persen penduduk berumur 15 tahun ke atas di Kota Tasikmalaya telah memiliki ijazah SMA/ sederajat dan 8,29 persen memiliki ijazah perguruan tinggi. Penduduk perempuan yang memiliki ijazah SMA/ sederajat ke atas sedikit tertinggal dibandingkan penduduk laki-laki.

(3) Ekonomi Daerah

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Dari data PDRB yang disajikan per kelompok (primer, sekunder, dan tersier) terlihat bahwa kelompok kategori tersier mendominasi dalam penciptaan nilai tambah di Kota Tasikmalaya. Kinerja perekonomian Kota Tasikmalaya pada periode 3 (tiga) tahun terakhir mengalami pertumbuhan positif, yaitu dengan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 mencapai 6,25 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara kategori-kategori yang sangat mendukung dan mengalami pertumbuhan yang tinggi adalah kategori informasi dan komunikasi, kategori jasa kesehatan dan kegiatan sosial, kategori pendidikan, dan kategori konstruksi. Kategori-kategori yang sangat dominan perannya di Kota Tasikmalaya pada tahun 2015 adalah kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, kategori konstruksi, dan kategori industri pengolahan.

b. Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi Kota Tasikmalaya pada tahun 2013-2015 menurut kelompok kategori primer, sekunder, dan tersier, memperlihatkan bahwa kategori tersier merupakan kategori yang memiliki peranan atau kontribusi dominan dalam penciptaan nilai tambah di Kota Tasikmalaya. Sementara kategori sekunder memiliki peranan atau kontribusi dominan kedua selama tiga tahun berturut-turut.

Pada kelompok kategori primer, peranan dan pertumbuhannya terus mengalami penurunan, hal ini diakibatkan dengan menurunnya luas sawah atau lahan pertanian yang berubah menjadi pemukiman atau bangunan, dan areal penggalian semakin lama semakin berkurang.

Peranan kategori tersier selama tiga tahun berturut-turut, merupakan kategori yang dominan di Kota Tasikmalaya. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Tasikmalaya merupakan kota maju. Tetapi perlu mendapat perhatian walaupun kategori tersier ini masih dominan, perannya menunjukkan sedikit penurunan. Pada tahun 2013 peranan kategori tersier sebesar 64,96 persen, pada tahun 2014 perannya turun menjadi 64,49 persen, dan pada tahun 2015 menjadi 64,51 persen. Apabila hal ini dibiarkan, maka dikhawatirkan kategori tersier yang dominan ini akan bergeser kepada kategori sekunder. Tentu hal ini merupakan keadaan yang tidak diharapkan. Oleh karena itu kondisi sekarang yang sudah dicapai harus dipertahankan dan ditingkatkan.

Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun, di Kota Tasikmalaya nampak sekali bahwa kelompok kategori primer mengalami penurunan kontribusi yang cukup signifikan. Pada tahun 2013 kelompok kategori primer yang mencakup kategori pertanian, kehutanan, perikanan, kategori

pertambangan dan penggalian mampu menyumbang 6,07 persen, namun terus menurun menjadi 5,85 persen pada tahun 2014 dan 5,63 persen pada tahun 2014.

Penurunan peran kategori primer dimungkinkan karena banyak terjadinya pengurangan luas lahan sawah dan lahan penggalian yang diakibatkan dari beralihnya fungsi lahan yang sebagian besar digunakan sebagai tempat permukiman/perumahan yang banyak terjadi di hamper seluruh wilayah Kota Tasikmalaya pada beberapa tahun terakhir. Kinerja kategori pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan dan penggalian semakin tertinggal perkembangannya dari kategori-kategori lainnya. Semakin meningkatnya konversi lahan pertanian di daerah perkotaan menjadi area permukiman, pertokoan, dan industri menyebabkan semakin menurunnya produksi pertanian di Kota Tasikmalaya. Di samping itu, berkurangnya potensi sumber daya alam penggalian serta pengendalian yang lebih ketat untuk usaha penggalian telah menyebabkan peran kategori penggalian terhadap pembentukan PDRB Kota Tasikmalaya tidak beranjak dari 0,01 persen.

Industri pengolahan di Kota Tasikmalaya sudah memiliki pangsa pasar tersendiri, baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional, karena memiliki keunggulan mutlak dan keunggulan komparatif dengan ciri produknya yang cenderung berbeda dari produk lainnya serta dengan produktivitas yang cukup tinggi, yaitu memiliki karakteristik yang khas Tasikmalaya, antara lain kerajinan bordir, kelom, anyaman mendong, kerajinan bambu, industri makanan dan alas kaki.

Besarnya potensi industri kecil dan menengah di Kota Tasikmalaya merupakan modal dasar yang harus terus dipertahankan keberadaannya bahkan masih mungkin untuk dikembangkan. Promosi dalam rangka menghimpun modal/investasi harus didukung oleh penciptaan iklim investasi yang nyaman dan kondusif, seperti kemudahan perijinan, stabilitas politik serta kenyamanan dan keteraturan tata kota.

Perkembangan sarana transportasi dan komunikasi juga perlu ditingkatkan karena sangat mendukung penyebaran informasi produk dan kelancaran distribusi barang hasil industri Kota Tasikmalaya ke wilayah lain. Upaya pengembangan kategori perdagangan sebagai kategori dominan yang diikuti oleh kebijakan yang mengutamakan sarana dan prasarana pasar komoditas lokal daripada komoditas impor tetap menjadi prioritas utama, sehingga industri pengolahan di Kota Tasikmalaya juga menjadi semakin bergairah.

c. Pendapatan Per Kapita

PDRB per kapita adalah ukuran produktivitas dari faktor-faktor produksi dalam suatu wilayah untuk melakukan transformasi berbagai sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya finansial dalam proses produksi sehingga dapat menghasilkan sejumlah pendapatan dimana pendapatan tersebut belum tentu seluruhnya diterima dan dinikmati masyarakat suatu wilayah tersebut. PDRB per kapita Kota Tasikmalaya terus mengalami peningkatan selama periode 2012-2015. Pada tahun 2012, PDRB per kapita Kota Tasikmalaya atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 17,09 juta kemudian naik menjadi Rp. 23,17 juta pada tahun 2013 dan Rp. 20,79 juta pada tahun 2014 kemudian naik lagi menjadi Rp. 23,17 juta pada tahun 2015. Kenaikan secara

rata-rata mencapai lebih dari 10 persen per tahunnya apabila dilihat perkembangan dari tahun 2012.

Kendati demikian peningkatan PDRB per kapita tersebut masih belum menggambarkan secara riil kenaikan daya beli masyarakat Kota Tasikmalaya secara umum. Hal ini disebabkan pada PDRB per kapita yang dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku masih mengandung faktor perubahan harga (inflasi atau deflasi) yang sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat.

Untuk memantau perkembangan daya beli masyarakat secara riil dapat digunakan PDRB per kapita yang dihitung dari PDRB atas dasar harga konstan, yaitu dengan asumsi tidak ada perubahan harga. PDRB per kapita yang dihitung dari PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2012 mencapai Rp. 15,93 juta, pada tahun 2013 menjadi Rp. 16,82 juta dan pada tahun 2014 mencapai 17,77 juta. Sedangkan pada tahun 2015, PDRB per kapita Kota Tasikmalaya mencapai Rp. 18,81 juta. Dari dua kondisi di atas memberi gambaran bahwa secara riil daya beli masyarakat tumbuh sebesar 5,88 persen pada tahun 2014.

Dibandingkan dengan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku, pertumbuhan PDRB per kapita atas dasar harga konstan Kota Tasikmalaya relatif lebih lambat, yaitu hanya 5,18 persen pada tahun 2012, 5,60 persen pada tahun 2013, 5,66 persen pada tahun 2014, dan 5,88 persen pada tahun 2015. Apabila dibandingkan dengan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kota Tasikmalaya yang kurang dari 1 persen dalam periode yang sama, maka laju pertumbuhan pendapatan per kapita (PDRB per kapita) Kota Tasikmalaya jauh lebih tinggi, yaitu lima kali lipat lebih.

Menurut teori Maltus, wilayah yang mempunyai laju pertumbuhan pendapatan per kapita lebih tinggi dari laju pertumbuhan penduduknya dan selisih keduanya semakin besar, maka diasumsikan bahwa wilayah tersebut akan mampu meningkatkan/memperbesar pendapatan dan melakukan investasi atau penanaman modal (*generate saving rate* dan *investment rate*) yang akan berdampak positif dalam pembentukan PDRB, sehingga akan mampu mengakselerasi perkembangan perekonomian daerah secara keseluruhan.

Oleh karena itu, berbagai upaya untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi juga harus dibarengi dengan upaya menekan laju pertumbuhan penduduk di Kota Tasikmalaya, apakah dengan penurunan angka kelahiran mau pun membatasi urbanisasi. Dengan demikian, daya beli masyarakat akan semakin meningkat yang pada akhirnya visi Pemerintah Kota Tasikmalaya tahun 2013-2017 yaitu Berdasarkan Iman dan Taqwa, mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Madani, dapat segera tercapai.

d. Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator ekonomi yang penting untuk diketahui pada suatu wilayah adalah laju pertumbuhan ekonomi (LPE). Indikator ini memperlihatkan bagaimana perekonomian di suatu wilayah tumbuh membesar dari sisi volume barang dan jasa yang dihasilkan. Idealnya, terutama bagi daerah yang sedang berkembang, laju pertumbuhan ekonomi terus meningkat yang berarti telah terjadi percepatan pembangunan ekonomi.

Laju pertumbuhan ekonomi dapat juga dijadikan sebagai ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah. Sekian milyar atau bahkan triliunan rupiah yang dibelanjakan oleh pemerintah untuk menghidupkan perekonomian suatu daerah akan terlihat keberhasilannya melalui indikator tersebut. Bisa jadi dana yang sudah dikeluarkan tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap perekonomian karena kurang tepatnya perencanaan. Sebaliknya, dana yang dibelanjakan mempunyai dampak ganda (*multiplier effect*) bagi perekonomian karena tepatnya perencanaan mau pun aplikasinya.

Di samping itu, indikator laju pertumbuhan ekonomi dapat memberikan gambaran bagi kemakmuran suatu daerah. Secara teori, laju pertumbuhan ekonomi yang meningkat akan berdampak pada penyediaan lapangan kerja sehingga mampu mengurangi pengangguran, yang pada akhirnya dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Berkurangnya pengangguran berarti bertambahnya orang yang bekerja atau bertambahnya orang yang berpenghasilan. Dengan kata lain, upah dan gaji yang dinikmati penduduk semakin banyak. Demikian juga, LPE yang meningkat berarti bahwa surplus usaha yang dinikmati pengusaha bertambah. Dengan demikian, kemakmuran penduduk semakin meningkat serta tingkat kemiskinan menurun.

Meskipun demikian, peningkatan LPE kadangkala kurang dapat dinikmati oleh penduduk suatu daerah, apabila ekonomi suatu daerah tersebut dibangun dari investasi asing (investasi yang berasal dari penduduk luar daerah tersebut), berarti peningkatan LPE tersebut banyak dinikmati oleh orang luar daerah. Apalagi jika komponen surplus usaha begitu dominan dibandingkan komponen yang lainnya. Penduduk daerah mungkin hanya sedikit menikmati kenaikan upah gaji yang ada.

Indikator LPE bisa diturunkan dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), khususnya PDRB atas dasar harga konstan. Secara sederhana, LPE digambarkan dari kenaikan PDRB konstan dari satu periode ke periode lainnya. Sedangkan PDRB merupakan jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas ekonomi di suatu wilayah pada periode waktu tertentu.

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat dinilai dengan berbagai ukuran agregat. Secara umum, pertumbuhan tersebut dapat diukur dengan membandingkan pendapatan regional atau PDRB antar periode. Pendapatan regional bukan hanya berguna untuk menilai perkembangan ekonomi output suatu wilayah dari waktu ke waktu, tetapi juga membandingkan dengan wilayah lain.

Dari pendapatan regional dapat diperoleh pertumbuhan ekonomi yang merupakan indikator yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian di suatu wilayah. Sehingga pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makro yang sering digunakan sebagai salah satu alat strategis kebijakan di bidang ekonomi. Demikian pula halnya di Kota Tasikmalaya, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), laju pertumbuhan ekonomi tersebut menjadi salah satu indikator yang sangat penting untuk selalu dievaluasi.

Perkembangan kinerja seluruh kategori ekonomi dalam membentuk PDRB Kota Tasikmalaya tahun 2013-2015 mengalami pertumbuhan positif. Kategori Informasi dan Komunikasi menjadi kategori yang tumbuh paling tinggi, dengan pertumbuhan sebesar 13,25 persen pada tahun 2015, kemudian diikuti oleh kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang

tumbuh 12,42 persen, kategori Jasa Pendidikan yang tumbuh sebesar 10,60 persen serta kategori Konstruksi dengan pertumbuhan sebesar 10,03 persen.

Perekonomian Kota Tasikmalaya pada tahun 2015 tumbuh sebesar 6,29 persen, artinya secara agregat, kuantitas output perekonomiannya meningkat sebesar 6,29 persen dibanding tahun sebelumnya. Untuk diketahui, bahwa sejak mulai berdirinya Kota Tasikmalaya sampai tahun 2015 perekonomian Kota Tasikmalaya secara konsisten dan meyakinkan mengalami perkembangan yang signifikan.

Apabila pertumbuhan ekonomi Kota Tasikmalaya secara komposisi ditelaah lebih lanjut menurut kategori, maka yang pertumbuhannya paling tinggi adalah kategori informasi dan komunikasi. Pertumbuhan kategori informasi dan komunikasi tersebut sangat dipengaruhi oleh peningkatan jumlah penggunaan alat komunikasi sebagai dampak dari kemajuan teknologi informasi di Kota Tasikmalaya.

Sementara pertumbuhan kategori konstruksi mendapat dukungan yang sangat besar dari adanya kegiatan pembangunan infrastruktur yang telah dilaksanakan oleh Pemkot Tasikmalaya dan pihak swasta dan masyarakat, dan kategori jasa pendidikan sangat didukung dengan adanya pembukaan sekolah-sekolah dan perguruan tinggi serta berbagai kursus baru yang ada di Kota Tasikmalaya. Tingginya permintaan produk kelompok kategori tersier merupakan indikasi adanya perkembangan suatu daerah menjadi kota, hal inilah yang dialami oleh Kota Tasikmalaya.

Apabila laju pertumbuhan ekonomi Kota Tasikmalaya tahun 2015 dijadikan sebagai dasar (*base line*), maka kinerja kategorial dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama adalah kategori yang berhasil mencapai pertumbuhan di atas rata-rata atau di atas LPE Kota Tasikmalaya; Kelompok Kedua adalah kategori yang berhasil mencapai pertumbuhan positif walaupun masih di bawah rata-rata; Kelompok Ketiga adalah kategori yang mengalami pertumbuhan negatif atau di bawah nol. Dari data yang ada terlihat bahwa di Kota Tasikmalaya tidak terdapat kategori yang berada pada kelompok ketiga.

Pertumbuhan kategori yang termasuk pada kelompok pertama yaitu kategori Informasi dan Komunikasi dengan pertumbuhan 13,25 persen, kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dengan pertumbuhan 12,42 persen, kategori Jasa Pendidikan dengan pertumbuhan 10,60, kategori konstruksi dengan pertumbuhan 10,03 persen, kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan pertumbuhan 6,90 persen, dan kategori Jasa Keuangan dan Asuransi dengan pertumbuhan 6,41 persen. Kategori Informasi dan Komunikasi merupakan kategori dengan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2015, kategori ini mampu tumbuh 13,25 persen. Dengan kinerja seperti ini diharapkan mampu menarik investor untuk menanamkan investasinya di Kota Tasikmalaya, sehingga akan dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Tasikmalaya.

Sedangkan pertumbuhan kategori-kategori lainnya termasuk dalam kelompok kedua, secara berturut-turut dari yang tertinggi yaitu kategori Jasa Lainnya dengan pertumbuhan 5,90 persen, kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dengan pertumbuhan 5,87 persen, serta kategori yang lainnya yang pertumbuhannya antara 2 sampai 4 persen.

(4) Tenaga Kerja dan Produktivitas

Potensi dan tantangan dalam ketersediaan tenaga kerja dapat dilihat dari *dependency ratio* atau angka rasio ketergantungan. Berdasarkan data kependudukan Kota Tasikmalaya, dapat dilihat bahwa angka rasio ketergantungan penduduk semakin kecil. Tahun 2013 tercatat sebesar 50,66 sedangkan tahun 2016 sebesar 48,26, berarti beban penduduk berumur produktif (15-64 tahun) di Kota Tasikmalaya semakin kecil. Kecamatan Tawang mempunyai angka rasio ketergantungan terendah (43,30%) dibanding kecamatan lain. Hal ini diduga karena di Kecamatan Tawang terdapat perguruan tinggi sehingga banyak pelajar/mahasiswa yang bertempat tinggal di sana. Sebaliknya Kecamatan Bungursari memiliki angka ketergantungan tertinggi, yaitu sebesar 52,44 persen.

Angka *dependency ratio* yang semakin rendah hingga mencapai 44 persen sering disebut Bonus Demografi. Hal ini merupakan suatu berkah yang langka karena penduduk usia produktif sangat melimpah yang dapat diberdayakan untuk memajukan perekonomian ke tingkat yang lebih tinggi. Manfaat bonus demografi akan diperoleh apabila ada kesiapan kebijakan seperti memperkuat investasi di bidang kesehatan, pendidikan mau pun ketenagakerjaan. Apabila tidak ada kesiapan dalam menghadapi bonus demografi, maka dapat menimbulkan pengangguran, kemiskinan, kawasan kumuh, dan perekonomian memburuk.

Pemanfaatan sumber daya produktif antara lain dapat dilihat dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan persentase penduduk yang mencari kerja/mempersiapkan usaha. Jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) terdapat sebanyak 478.362 orang. Dari penduduk usia kerja tersebut, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sekitar 62,69 persen dan persentase penduduk yang mencari kerja/mempersiapkan usaha terhadap penduduk angkatan kerja sebesar 4,22 persen.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja laki-laki (80,34%) lebih tinggi daripada perempuan (45,03%). Hal ini karena perempuan lebih banyak pada kegiatan mengurus rumah tangga. Namun demikian, persentase yang mencari kerja/mempersiapkan usaha sebesar 5,35 persen lebih tinggi daripada laki-laki yang hanya 3,59%. Kecamatan Cibeureum mempunyai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tertinggi (66,71%), sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terendah di Kecamatan Indihiang (56,17%). Ada pun persentase tertinggi penduduk yang mencari kerja/mempersiapkan usaha di Kecamatan Tawang (9,85%) diikuti Kecamatan Cihideung (6,55%) dan Bungursari (5,15%), sedangkan persentase terendah penduduk yang mencari kerja/mempersiapkan usaha di Kecamatan Tamansari (2,06%).

Berdasarkan wawancara dengan para informan yang berasal dari Pemerintah Kota Tasikmalaya diperoleh informasi bahwa upah buruh di sana masih relatif rendah. Ini merupakan peluang bagi para pengusaha untuk melakukan investasi di Kota Tasikmalaya tanpa ketakutan akan tingginya biaya tenaga kerja. Rendahnya upah buruh disebabkan oleh pendidikan yang kurang memadai. Dalam jangka panjang kualitas buruh atau pegawai non formal yang rendah dapat menghambat investasi, karena para pengusaha akan lebih memilih pegawai yang mempunyai pendidikan yang lebih tinggi.

(5) Infrastruktur Fisik

Infrastruktur fisik yang diduga mempengaruhi daya tarik investasi adalah yang terkait dengan transportasi dan komunikasi. Berbicara tentang transportasi, tentu tidak bisa lepas dari jalan raya sebagai prasarana utama dalam sistem transportasi. Panjang jalan dan kualitas jalan di Kota Tasikmalaya masih cukup memadai untuk mendukung investasi dalam berbagai sektor. Tipe jalan yang melewati Kota Tasikmalaya di antaranya adalah jalan negara, jalan provinsi, dan jalan kabupaten. Jalan negara dan jalan provinsi dengan kualitas baik dan sudah diaspal seluruhnya. Sementara jalan kota masih ada yang terbuat dari tanah, terutama yang ada di pelosok kota. Tetapi secara umum masih dapat menunjang kegiatan berusaha di Kota Tasikmalaya. Apalagi jaringan jalan di Kota Tasikmalaya sudah dilengkapi dengan rambu-rambu dan kelengkapan transportasi sesuai setandar yang ditetapkan.

Sistem transportasi di Kota Tasikmalaya juga didukung dengan adanya lima terminal yang cukup besar dan dikelola dengan baik, sehingga retribusinya mempunyai kontribusi terhadap pendapatan asli daerah di Kota Tasikmalaya. Terminal yang ada di Kota Tasikmalaya tidak hanya dilewati oleh angkutan kota, tetapi juga bis antar kota antar provinsi yang jumlahnya cukup banyak. Sebut saja PO Budiman dan PO Primajasa yang menguasai bis antar kota antar provinsi di Pulau Jawa. Kondisi ini sangat menunjang kelancaran lalu lintas sebagai moda transportasi masyarakat serta pengiriman barang dengan tujuan komersil. Hal ini ditunjang juga dengan keberadaan stasiun kereta api yang berada di lokasi yang cukup strategis. Keberadaan stasiun kereta api di Kota Tasikmalaya dengan frekuensi lalu lintas yang cukup sering merupakan peluang usaha yang sangat menjanjikan bagi para pengusaha yang akan membuka usahanya di Kota Tasikmalaya.

Selain sistem transportasi yang sudah cukup baik, sarana komunikasi di Kota Tasikmalaya juga semakin meningkat, baik dari sisi kualitas mau pun kuantitas. Tentu saja tidak mengherankan, karena jenis usaha yang paling tinggi kontribusinya terhadap PDRB di Kota Tasikmalaya adalah kategori jasa informasi dan komunikasi. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya jumlah BTS sebagai bukti bahwa komunikasi berbasis seluler semakin intens dilakukan di Kota Tasikmalaya. Sehingga tidak mengherankan jika penjualan sarana komunikasi juga semakin gencar. Semakin banyak gerai-gerai yang menjual telepon genggam dengan berbagai merk dan berbagai tingkatan kecanggihan. Tentu saja ini merupakan daya tarik investasi yang cukup tinggi, apalagi di era digital seperti sekarang ini, tanpa sarana komunikasi yang semakin cepat dan canggih, pasti usaha apa pun jadi tidak menarik lagi.

2. Determinan Daya Tarik Investasi di Kota Tasikmalaya

Untuk menentukan determinan daya tarik investasi di Kota Tasikmalaya digunakan modifikasi dari model *Analytical Hierarchy Process (AHP)*. Struktur model AHP yang akan digunakan hanya mengandung goal (tujuan) dan kriteria, tanpa alternatif seperti pada model asli (lihat Gambar 1). Langkah selanjutnya adalah membuat matriks berpasangan untuk kriteria tersebut. Tabel berikut memperlihatkan matriks berpasangan untuk kelima kriteria yang digunakan, setelah dilakukan pembobotan melalui proses diskusi dan wawancara dengan para informan yang terdiri atas: pimpinan dan staf di Pemerintah Kota Tasikmalaya, meliputi: Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan; para pengusaha (bordir, batik, mendong, alas kaki, kuliner), serta tokoh masyarakat.

Tabel 6 Matriks Berpasangan Untuk Level Kriteria

Kriteria	Kelembagaan	Sosial Politik	Ekonomi Daerah	Tenaga Kerja	Infrastruktur
Kelembagaan	1	3	0.333333333	4	2
Sosial Politik	0.333333333	1	0.25	2	0.333333333
Ekonomi Daerah	3	4	1	5	2
Tenaga Kerja	0.25	0.5	0.2	1	0.5
Infrastruktur	0.5	3	0.5	2	1
Total	5.083333333	11.5	2.283333333	14	5.833333333

Sumber: Hasil Wawancara dan Penilaian Responden

Berdasarkan perhitungan lengkap seperti yang bisa dilihat pada lampiran, selanjutnya dapat ditentukan nilai *eigenvector* dari setiap kriteria. Nilai ini menunjukkan ranking tingkat kepentingan setiap kriteria dengan indeks konsistensi sebesar 0,04. Dengan demikian data dianggap konsisten karena nilai indeks konsistensi lebih kecil dari 0,1. Berikut adalah urutan kriteria dengan nilai *eigenvector* masing-masing.

Tabel 7 Urutan Kriteria

Urutan	Kriteria	<i>Eigenvector</i>
1	Ekonomi Daerah	0,41
2	Kelembagaan	0,25
3	Infrastruktur	0,18
4	Sosial Politik	0,09
5	Tenaga Kerja	0,07

Sumber: Hasil Perhitungan

Dari tabel tersebut bisa disimpulkan bahwa ekonomi daerah merupakan kriteria yang paling menentukan daya tarik investasi di Kota Tasikmalaya. Artinya, para pengusaha akan melihat kondisi ekonomi daerah terlebih dahulu ketika akan berusaha atau menanamkan modalnya di Kota Tasikmalaya. Selanjutnya akan dilihat kriteria lainnya yang mendukung kelancaran investasi, seperti kelembagaan, infrastruktur, dan sosial politik. Tenaga kerja merupakan kriteria terakhir penentu daya tarik investasi di Kota Tasikmalaya. Bukan berarti kriteria ini tidak penting, tetapi pengaruhnya lebih mudah untuk dikendalikan, mengingat tenaga kerja cukup melimpah dan relatif murah.

SIMPULAN

1. Daya tarik investasi di Kota Tasikmalaya dilihat dari 5 (lima) aspek semuanya mendukung kelancaran investasi. Aspek yang agak kurang adalah tenaga kerja dan produktivitas, karena upah buruh yang relatif rendah yang diakibatkan rendahnya pendidikan buruh. Ada

- pun sektor yang merupakan daya tarik untuk investasi adalah sektor tersier, dengan kategori informasi dan komunikasi, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, kategori pendidikan, kategori konstruksi, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, serta kategori industri pengolahan.
2. Determinan daya tarik investasi di Kota Tasikmalaya berdasarkan persepsi para pengusaha sesuai peringkat adalah aspek ekonomi daerah, kelembagaan, infrastruktur fisik, sosial politik, serta tenaga kerja dan produktivitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappeda Kota Tasikmalaya dan BPS Kota Tasikmalaya, 2016, Data Hasil Survey Sosial Ekonomi Daerah Kota Tasikmalaya.
- Bappeda Kota Tasikmalaya dan BPS Kota Tasikmalaya, 2016, Produk Domestik Regional Bruto Per Kecamatan Kota Tasikmalaya Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2015.
- Bappenas, 2004, Kajian Strategi Pengembangan Kawasan Dalam Rangka Mendukung Akselerasi Peningkatan Daya Saing Daerah, Jakarta: Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal.
- BUNRUAMKAEW, K. (2012). How to do AHP analysis in Excel, Division of Spatial Information Science Graduate School of Life and Environmental Sciences University of Tsukuba
- Conti, Fergio and Giacaria Paolo, 2011, Local Development and Competitiveness, Netherlands: Kluwer Academic Publisher.
- Frinces, Heflin Z., 2011, Persaingan dan Daya Saing Kajian Strategis Globalisasi Ekonomi, Yogyakarta: MIPA Pustaka.
- Indrawati, D., 2012, Analisis Elemen-Elemen Prakondisi Pembentukan Daerah Otonom Baru dan Daya Saing Investasi Daerah Otonom Baru (Studi di Kabupaten Bandung Barat), Tesis, Universitas Indonesia.
- Kementerian Dalam Negeri RI, 2011, Evaluasi Daerah Otonom Baru Hasil Pemekaran (EDOHP) 2011.
- Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), 2005, Investment Competitiveness of Regencies/Cities in Indonesia: Perception of the Business Community, Jakarta: KPPOD bekerjasama dengan Asian Foundation.
- KPPOD, 2001-2005, Daya Tarik Investasi Kabupaten/Kota di Indonesia, Jakarta: KPPOD.
- KPPOD, 2003, Peningkatan Daya Tarik Investasi 200 Kabupaten/Kota di Indonesia, Laporan Penelitian.
- Kuncoro, M dan Rahajeng A., 2005, Daya Tarik Investasi dan Pungli di DIY, Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 10 No. 2, Agustus 2005 Hal: 171 – 184.

- Marimin, 2004, Teknik dan Aplikasi Pengambilan Keputusan Kriteria Majemuk, Grasindo, Jakarta.
- Saaty, T.L., 1993, Decision Making for Leader: The Analytical Hierarchy Process for Decision in Complex World, Prentice Hall Coy. Ltd.: Pittsburgh
- Singarimbun, M. dan Effendi, S, 1997, Metode Penelitian Survei, LP3ES.
- Sodik, J dan Nuryadin D., 2008, Determinan Investasi di Daerah: Studi Kasus Propinsi di Indonesia, Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 13 No. 1, April 2008 Hal. 15 – 31.
- Suratno, 2010, Metode Penelitian Kualitatif, Makalah Seminar Metodologi Penelitian, Program Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri “Antasari”, Banjarmasin.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Kota Tasikmalaya.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- World Economic Forum (WEF), 2005, Global Competitiveness Report 2005-2006, Palgrave Macmillan.
- Yin, R.K., 2003, Case Study Research, Design and Methods (3rd edition), Thousand Oaks CA: Sage Publication.